

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Biografi KH. Abdurrahman Wahid

KH. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu figur fenomenal yang telah membawa dinamika kesejahteraan Indonesia. KH. Abdurrahman Wahid juga berhasil menemukan pijakan bagi pencarian jawaban-jawaban yang strategis bagi penguatan *civil society* di masa depan.¹

KH. Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan panggilan KH. Abdurrahman Wahid karena Gus adalah panggilan kehormatan khas didunia pesantren kepada seorang anak Kyai yang berarti abang atau mas. KH. Abdurrahman Wahid dilahirkan pada tanggal 7 September 1940 didaerah Denanyar, dekat kota Jombang, Jawa Timur, dirumah Pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kyai Bisri Syanuri. Beliau dilahirkan di lingkungan keluarga muslim yang Jawa terkemuka. Ia merupakan putra tertua dari enam bersaudara yang masih keturunan “darah biru”. Ayahnya KH. Wahid Hasyim adalah putra KH. Hasyim Asy’ari, ulama besar yang telah mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Hj. Sholehah Bisri Syansyuri adalah dua tokoh pendiri Nahdatul Ulama (NU) Sebuah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia.²

Pada tahun 1944, KH. Abdurrahman Wahid Pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, KH. Abdurrahman Wahid kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda.

Pada akhir perang tahun 1949, KH. Abdurrahman Wahid pindah ke Jakarta dan Ayahnya di tunjuk sebagai Menteri Agama. KH. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMPEP) di

¹Greg Barton, “The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid terjemahan Lie Hua”, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta 2011), 12.

²Syamsul Bakri Mudhofir, “Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaharuan Islam di Indonesia”, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2014), 23.

Tanah Abang. Selanjutnya pada sore harinya KH. Abdurrahman Wahid melanjutkan belajar mengaji kepada KH Ali bin Maksum bin Ahmad di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, KH. Abdurrahman Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo, Magelang.

Pada tahun 1963, KH. Abdurrahman Wahid menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Pada usia 22 tahun). Dan pada tahun 1965 ia mulai belajar tentang Studi Islam dan bahasa Arabnya. Di Mesir, Ia bekerja di Kedutaan Besar Indonesia.

Pada tahun 1966 KH. Abdurrahman Wahid pindah ke Irak, sebuah negara modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Di Irak ia masuk dalam *Departement of Religion* di Universitas Bagdad sampai tahun 1970. Selepas belajar di Baghdad KH. Abdurrahman Wahid bermaksud melanjutkan studinya ke Eropa. Akan tetapi persyaratan yang ketat, utamanya dalam bahasa-misalnya untuk masuk dalam kajian klasik di Kohn, harus menguasai bahasa Hebrew. Akhirnya ia kembali ke Indonesia setelah terilhami berita-berita yang menarik sekitar perkembangan dunia pesantren. Perjalanan keliling studi KH. Abdurrahman Wahid berakhir pada tahun 1971.³

Setelah kembali ke Jakarta, Ia bergabung di Fakultas Ushuluddin Universitas Tebuingireng Jombang, tiga tahun kemudian dia menjadi sekertaris Pesantren Tebuireng, dan pada tahun yang sama KH. Abdurrahman Wahid mulai menjadi penulis dan kolumnis. Lalu pada tahun 1974 KH. Abdurrahman Wahid bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat.

Pada tahun 1977, KH. Abdurrahman Wahid bergabung dengan Universitas Hasyim Asyari dan beliau sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan. Kakeknya Bisri Syansuri menawarinya bergabung dengan NU, akhirnya KH. Abdurrahman Wahid Bergabung dengan NU. Pada Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang menyuarakan agar KH. Abdurrahman Wahid menjadi nominasi ketua NU yang baru. Akhirnya, KH. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi ketua umum PBNU, namun permintaannya untuk memilih sendiri pengurus dibawah kepemimpinannya tidak

³Heru Prasetya, "*Gus Dur Van Jombang*", (Yogyakarta: Penerbit Bentang 2010), 10.

dipenuhi. Pada tahun 1985, KH. Abdurrahman Wahid ditunjuk Soeharto untuk menjadi Indoktrinator Pancasila. Pada tahun 1987, KH. Abdurrahman Wahid lebih menunjukkan dukungannya terhadap rezim orde baru dengan mengkritik PPP dalam pemilu legislatif 1987 dan Ia memperkuat partai Golkar, kemudian Ia menjadi anggota MPR mewakili Golkar.

Pada Musyawarah Nasional 1989, KH. Abdurrahman Wahid terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU selama masa jabatan kedua sebagai ketua NU, ide liberal KH. Abdurrahman Wahid mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. KH. Abdurrahman Wahid terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.⁴

Pada Musyawarah Nasional 1994, KH. Abdurrahman Wahid kembali terpilih menjadi Ketua NU dan Ia mulai melakukan aliansi politik dengan Megawati Soekarno Putri. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali KH. Abdurrahman Wahid sebagai ketua NU.

Pada Juni 1998, banyak orang komunitas NU mengusulkan agar KH. Abdurrahman Wahid mendirikan partai politik dan permintaan tersebut mulai ditanggapi pada bulan Juli, Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi me nyatakan KH. Abdurrahman Wahid sebagai kandidat pemilihan presiden.⁵

Pada Juni 1999, partai PKB ikut serta dalam pemilu legislatif, PKB memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi mengumumkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid yang akan dicalonkan sebagai presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul untuk mulai memilih presiden baru, kemudian KH. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Indonesia ke-4 dengan perolehan 373 suara.⁶

⁴Munawar Ahamd, "*Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*", (Yogyakarta: Lkis 2010), 84.

⁵Muhammad Rifai, "*Gus Dur: K Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*", (Yogyakarta: Garasi House of Book 2010), 96.

⁶Abdul Munir Mulkhan, "*Perjalanan Politik Gus Dur*", (Jakarta: Kompas 2010,) 43.

1. Karya-Karya KH. Abdurrahman Wahid

Sejumlah karya tulis membuktikan intelektualisme KH. Abdurrahman Wahid yang kaya dengan gagasan dan pemikiran kreatif-transformatif dan inovatif. Tulisan-tulisan ini juga mungkin suatu bukti bahwa gerakan atau aksi KH. Abdurrahman Wahid tidak hampa teori atau tidak tanpa visi, yang suatu waktu dapat terjerumus pada oportuniste dan pragmatism politik. Ketajamannya membaca realitas dan kekritisannya mengambil keputusan dapat dilihat dari kecenderungan tulisan-tulisan tersebut.

Tulisan KH. Abdurrahman Wahid dari studi bibliografis ternyata ditemukan ada 493 buah tulisan KH. Abdurrahman Wahid sejak awal 1970-an hingga awal tahun 2000. Hingga akhir hayatnya 2009, bisa jadi telah lebih dari 600 buah tulisan KH. Abdurrahman Wahid. Karya intelektual yang ditulis selama lebih dari dua dasawarsa itu diklasifikasikan delapan bentuk tulisan, yakni tulisan dalam bentuk buku, terjemahan, kata pengantar buku, epilog buku, analogi buku, dan makalah.

Penulis akan mencantumkan beberapa karya KH. Abdurrahman Wahid tersebut sebagai berikut.⁷

- a. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi, Wahid institute, 2006.
- b. Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan. Penerbit: PT. The Wahid Institute 2007.
- c. Tuhan Tidak Perlu Dibela, LkiS, Jogjakarta, 1999.
- d. Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, Desantra, Jakarta, 2001.
- e. Prisma pemikiran KH. Abdurrahman Wahid, Yogyakarta. Penerbit: Lkis.1999.
- f. Membangun Demokrasi, Bandung. Penerbit: PT Remaja Rosdakarya. 1999.
- g. Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren, Yogyakarta. Penerbit: Lkis. 2001.
- h. KH. Abdurrahman Wahid Menjawab Perubahan zaman. Jakarta. Penerbit: Kompas, 1999.
- i. KH. Abdurrahman Wahid Bertutur. Jakarta. Penerbit: Harian Proaksi, 2005.

⁷Faisol, “Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global,” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2011), 73.

- j. Tabayun KH. Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Feformasi Kultural, 1998.
- k. Islam, Negara, dan Demokrasi, Erlangga, Jakarta, 1999.
- l. Mengurai Hubungan Agama dan Negara, Grasindo, Jakarta, 1999.
- m. Bunga Rampai Pesantren, CV Drama, tanpa tahun, tanpa tempat.
- n. Gila KH. Abdurrahman Wahid, LkiS, Jogjakarta, 2000.
- o. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah, LkiS, Jogjakarta, 1997.
- p. Kumpulan Kolom dan Artiker Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser, LkiS, Jogjakarta, 2002.
- q. Islam Tanpa Kekerasan, LkiS, Jogjakarta, 1998.

B. Analisis Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi Islam

1. Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Islam

Dengan latar belakang pendidikan, pergaulan dan perkenalannya dengan dunia keilmuan yang cukup kosmopolit itu, KH. Abdurrahman Wahid mulai muncul ke permukaan percaturan intelektual Indonesia dengan pemikiran-pemikiran briliannya pada tahun 1970-an, ketika ia aktif di berbagai lembaga sosial, LSM dan forum-forum diskusi. Kendati latar belakang pendidikan formalnya tidak ditempuh Barat, Menurut Greg Barton, ia secara intelektual jauh lebih siap untuk berpartisipasi dalam wacana-wacana besar mengenai pemikiran Barat, pendidikan Islam dan masyarakat Muslim. Studinya di Baghdad telah memberikan dasar-dasar yang baik mengenai pendikan bercorak liberal dan bergaya Barat serta sekuler.⁸

Dalam beberapa hal pemikiran, KH. Abdurrahman Wahid menekankan pada pemikiran yang fleksibel dan progresif yang dapat ditemukan pada beberapa ulama NU, termasuk diantara pendahulunya, yaitu Kyai Achmad Shiddiq. Ulama lain yang dapat diidentifikasi seperti itu adalah kakek KH. Abdurrahman Wahid (Kyai Hasjim Asy'ari), ayahnya (Wahid Hasyim), saudara tua Kyai Achmad Shiddiq yaitu Machfudz Shiddiq dan bahkan Wahab Hasbullah. Walaupun

⁸Santoso, Listiyono, "*Teologi politik Gus Dur*", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2010), 60.

ada perbedaan dan Persamaan di antara tokoh-tokoh tersebut, tapi KH. Abdurrahman Wahid adalah produk zamannya.⁹

Wahid Hasyim adalah termasuk sosok Kiai yang memiliki beberapa sifat unggul. Pertama, Ia memiliki jiwa yang tinggi terhadap perbedaan paham dan selalu bersikap proporsional dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi. Kedua, Mempunyai kepedulian yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam. Ketiga, Senantiasa bersikap kritis meskipun terhadap umat Islam sendiri.

Sebagaimana intelektual sunni tradisional pada umumnya, KH. Abdurrahman Wahid telah mengembangkan pemikirannya melalui paradigma kontekstualisasi khazanah pemikiran sunni tradisional (klasik). Oleh karena itu, wajar jika yang menjadi kepedulian utama KH. Abdurrahman Wahid adalah revitalisasi khazanah Islam tradisional Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah, bahkan Nahdhatul Ulama (NU) bisa dipastikan sebagai representase dari paham sunni yang berkiprah dalam wacana modernitas, dan berupaya mencari jawaban atas Persoalan konkret yang dihadapi umat Islam Indonesia. Model pemikiran KH. Abdurrahman Wahid yang liberal dan inklusif sangat dipengaruhi oleh penelitiannya yang panjang terhadap khazanah pemikiran Islam tradisional yang kemudian menghasilkan reinterprestasi dan kontekstualisasi. Oleh karena itu, model pemikirannya terkadang disebut juga dengan paradigma “serba fiqh.”¹⁰

Pada bukunya yang berjudul “Islam Kosmopolitan” KH. Abdurrahman Wahid menggarisbawahi tentang ajaran moralitas Islam yang secara teoritik bertumpu pada adanya lima buah jaminan dasar yang diberikan Islam kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

Diantaranya adalah:

- a. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (*hifdzu ad-nafs*).
- b. Keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*hifdzu ad-din*).

⁹Bukhori, Pahrurroji, “*Membebaskan Agama Dari Negara*”, (Pemikiran Abdurrahman wahid dan ‘Ali ‘Abd ar-Raziq, Bantul: Pondok Edukasi 2011), 61.

¹⁰Abdurrahman Wahid, “*Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*,” Jakarta: The Wahid Institute 2007, 4.

- c. Keselamatan keluarga dan keturunan (*hifdzu an-nasl*)
- d. Keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau penggusuran di luar prosedur hukum (*hifdzu al-mal*).
- e. Keselamatan hak milik dan profesi (*hifdzu al-milk*).

Kelima jaminan dasar itulah yang kemudian secara konseptual dijadikan KH. Abdurrahman Wahid sebagai acuan yang bersifat paradigmatis menjadi prinsip-prinsip universal Islam dan kerangka substantif Islam. Menurut KH. Abdurrahman Wahid, jika kelima unsur itu tampil sebagai pandangan hidup dan bulat, maka tidak mustahil Negara akan bisa dikelola oleh pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya persamaan derajat dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan pandangan. Di samping itu, secara fungsional misi Islam terhadap perbaikan sosial akan secara efektif bisa dikendalikan dan akhirnya terciptalah budaya toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian kepada unsur-unsur kemanusiaan dan keprihatinan yang penuh kearifan akan keterbelakangan kaum muslim sendiri akan memunculkan tenaga luar biasa untuk membuka belenggu kebodohan dan kemiskinan yang begitu kuat mencekam kehidupan mayoritas kaum muslim dewasa ini.¹¹

Secara genetik, mantan ketua umum PBNU (Periode 1984-1989, 1989-1994, dan 1994-1999) dan mantan Presiden Republik Indonesia yang hanya bisa bertahan kurang lebih dua tahun ini termasuk keturunan darah biru. Ayahnya KH. Wahid Hasyim adalah putra KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Ormas NU dan pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ibundanya Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, KH. Bisri Syamsuri. Dengan demikian, KH. Abdurrahman Wahid merupakan cucu dari dua ulama besar NU sekaligus tokoh penting bangsa Indonesia.

Namun popularitas KH. Abdurrahman Wahid bukan semata-mata karena ia merupakan keturunan darah biru. Popularitas KH. Abdurrahman Wahid dibentuk melalui proses panjang, dimana ia pernah berorganisasi dan belajar di Mesir, Irak, serta beberapa Negara Eropa. Di sejumlah Negara tersebut, KH. Abdurrahman Wahid tekun mempelajari berbagai macam pengetahuan, baik yang lahir dari rahim (tradisi) Islam maupun Barat. Perjalanan panjang KH. Abdurrahman Wahid

¹¹Akhmad Taufik, "*Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), 72.

tersebut tentu ikut memberikan kontribusi dalam mempopulerkan nama besarnya.

KH. Abdurrahman Wahid adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal, yaitu pemahamannya yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama. Semangat pemikiran liberalisasi KH. Abdurrahman Wahid telah terlihat ketika ia melakukan penolakan atas Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang kaum muslimin menghadiri perayaan keagamaan golongan lain. Fatwa tersebut dianggapnya sebagai upaya MUI main mutlak-mutlakan pemahaman keagamaan tertentu dalam masyarakat.¹²

Ketika KH. Abdurrahman Wahid mengeluarkan gagasan tentang perlunya pribumisasi Islam sebagai jawaban atas problem yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarahnya, yakni bagaimana mempertemukan budaya ('adab) dengan norma (syari'ah). Persoalan yang sampai sekarang cenderung menjadi polemik berkepanjangan, terutama ketika dihadapkan dengan pemahaman keagamaan yang eksklusif dan mengaku puritan. Pribumisasi Islam merupakan suatu pemahaman Islam yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa megubah hukum itu sendiri. Baginya, ada independensi sendiri-sendiri antara agama dan budaya, meskipun seringkali tumpang tindih.¹³

Itulah sebabnya KH. Abdurrahman Wahid berkeyakinan bahwa pribumisasi tidak akan mereduksi kebenaran agama. Islam harus tetap pada Islamnya. Al-Qur'an harus tetap dalam bahasa arab, terutama dalam shalat, sebab hal itu telah menjadi norma. Sedangkan terjemahan al-Qur'an hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan al-Qur'an itu sendiri.

Pribumisasi bagi KH. Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk mengukuhkan kembali akar budaya, dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama. Gagasan itulah yang membuat KH. Abdurrahman Wahid harus

¹²Ato Sugiarto, "*Demokrasi Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid*", (Jakarta: UIN 2010), 39.

¹³Santoso, Listiyono, "*Teologi politik Gus Dur*", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 60.

berhadapan dengan kelompok Islam tertentu. Bahkan, dengan kalangan NU yang tidak sepakat dengan gagasan yang liberal itu. Hal ini terjadi karena soal pendekatan atas sebuah tema dan terminologi yang cenderung berbeda. Titik tolak yang berbeda juga menjadi penyebab adanya pertentangan tersebut. Padahal secara sederhana, KH. Abdurrahman Wahid hanya menginginkan bahwa yang “dipribumikan” adalah manifestasi kehidupan Islam belaka, Bukan ajaran yang menyangkut keimanan dan peribadatan formalnya. Baginya, tidak diperlukan Qur’an Batak dan Hadist Jawa. Islam tetap Islam, dimana saja berada.¹⁴

Mengenai formalisasi, ideologisasi, dan syari’atisasi. Pandangan KH. Abdurrahman Wahid tentang hal itu, bahwa KH. Abdurrahman Wahid tidak menyetujui gagasan tentang Negara Islam. Menurutnya, Islam tidak mempunyai wujud doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal politikkenegaraan. Memang, Islam tidak akan pernah lepas dari politik, yakni dalam pengertian melakukan transformasi sosial-kemasyarakatan. Hanya wujud dan formatnya yang tidak diberikan aturan yang sangat tegas, sehingga KH. Abdurrahman Wahid mempunyai kesimpulan bahwa Islam memang tidak memiliki konsep tentang bagaimana Negara dibuat dan dipertahankan.

Dasar yang dipakai KH. Abdurrahman Wahid ada dua macam. Yang pertama adalah, bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan. Itu terbukti ketika Nabi Muhammad wafat dan digantikan oleh Abu Bakar, Pemilihan Abu bakar sebagai pengganti Rasulullah dilakukan melalui bai’at oleh para kepala suku pada waktu itu, sedangkan Abu Bakar sebelum wafat menyatakan kepada kaum muslimin, hendaknya Umar bin Khattab yang diangkat menggantikan posisinya. Ini berarti sistem yang dipakai adalah penunjukan. Sementara Umar bin Khattab menjelang wafatnya meminta agar penggantinya ditunjuk melalui sebuah dewan ahli yang terdiri dari tujuh orang. Lalu dipilihlah Ustman bin Affan untuk menggantikannya Umar dan selanjutnya Ustman digantikan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Abu Sufyan juga telah menyiapkan anak cucunya untuk menggantikannya Ali. Sistem ini kelak menjadi acuan untuk

¹⁴Abdurrahman Wahid, "*Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*", (The Wahid Institute, 2006), 42.

menjadikan kerajaan atau marga yang menurunkan calon-calon raja dan sultan dalam sejarah Islam.

Sedangkan yang kedua adalah, besarnya Negara yang diidealisasikan oleh Islam, juga tidak jelas ukurannya. Nabi Muhammad meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan kaum muslimin. Tidak ada kejelasan, misalnya Negara Islam yang diidealkan bersifat mendunia dalam konteks Negara-bangsa (*nation state*), ataukah hanya Negara-kota (*city state*).

KH. Abdurrahman Wahid menyimpulkan bahwa Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif. Buktinya dalam satu pemerintahan yang paling pokok itu (sebagaimana dasar yang dipakai KH. Abdurrahman Wahid yang pertama) yaitu persoalan suksesi kekuasaan (penggantian), ternyata Islam tidak mempunyai pola yang tetap. Kadang memakai konssep istikhlah (kasus Abu Bakar ke Umar bin Khattab). Kadang juga memakai sistem bai'at (umat memba'iat Abu Bakar). Dan juga kadang memakai sistem *ahl al-ahll wa al-aqd* (sistem urgen dalam masalah kenegaraan). Tiga model (istikhlah, bai'at, dan *ahl al-ahll wa al-aqd*) ini terjadi hanya dalam tempo 13 tahun, padahal kalau memang Islam mempunyai konsepnya, tentu tidak akan demikian, apalagi para sahabat adalah orang yang paling takut dengan Rasulullah.¹⁵

KH. Abdurrahman Wahid juga di kenal dengan aktifitas silturrahminya yang luar biasa. Apalagi mengingat kondisi KH. Abdurrahman Wahid yang seharusnya lebih banyak beristirahat, maka tidak mengherankan jika semasa ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke empat, ia termasuk salah satu Presiden yang mencapai rekor paling banyak dalam perjalanan silaturrhminya. Terlepas dari kekurangannya, KH. Abdurrahman Wahid adalah aset nasional yang juga dikagumi di dunia internasional. Salah satu faktor penentunya adalah intensitasnya dalam melakukan silaturrahmi dengan berbagai kalangan tanpa memandang kelompok, suku, bangsa, dan agama.

2. **Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi**

Demokrasi dan proses ke arah demokratisasi selalu terkait dengan peran politik. Selama belum ada penguatan terhadap partai politik, maka selama itu pula belum ada pilar

¹⁵Abdurrrhman Wahid, "Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi", (The Wahid Instiute, 2006), 98.

yang ideal bagi tegaknya demokrasi. Namun keharusan adanya partai politik yang kuat dan mandiri tidak selalu dapat dipenuhi dalam waktu singkat. Hal itu tidak terlepas dari upaya rasionalisasi yang masih dibutuhkan terhadap sistem politik dan upaya penumbuhan budaya demokrasi yang sehat sebagai landasan pemberdayaan partai politik.

Demokrasi merupakan salah satu tema besar dalam pemikiran politik KH. Abdurrahman wahid. Penerimaan konsep demokrasi adalah pilihan logis yang bagi KH. Abdurrahman wahid menganggap sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Menurut KH. Abdurrahman Wahid, ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi, yaitu:

- a. Islam adalah agama hukum, yang berarti agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelata dikenakan hukum yang sama.
- b. Islam memiliki asas permusyawaratan. Dengan demikian dalam permusyawaratan terdapat tradisi membahas dan tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka yang diakhiri dengan kesepakatan.
- c. Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Kehidupan umat manusia itu tarafnya tidak boleh tetap, harus ada peningkatan agar bisa menghadapi kehidupan selanjutnya.¹⁶

Sejak berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto pada Tahun 1998, Indonesia terlatih memasuki proses transisi menuju demokrasi. Era pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang tampil setelah itu mencoba mengintroduksi berjalanya prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis dengan memberlakukan berbagai macam aneka kebebasan, maka lahirlah pelaksanaan kebebasan Pers, Pelepasan narapidana politik dan tahanan politik, Penerapan sistem multipartai, Pelaksanaan pemilihan umum yang jauh lebih jujur dan adil dibandingkan pada masa orde baru, Pemulihan kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta pemulihan kompetisi politik.

Apa yang dilakukan Presiden KH. Abdurrahman Wahid adalah kelanjutan logis dari apa yang dijalankan Habibie. Pada masa kekuasaan Presiden KH. Abdurrahman

¹⁶Abdurrahman Wahid, "*Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*", (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 156..

Wahid dalam melanjutkan proses demokratisasi ditandai oleh adanya amandemen UUD 1945 demi menciptakan kedudukan legislatif yang seimbang dengan kedudukan eksekutif, Kembalinya DPR mendapat keleluasaan menjalankan politik legislasi untuk menghasilkan berbagai Undang-undang, dikontrolnya militer oleh pemerintahan sipil dengan peran dwi fungsinya yang dikurangi secara mendasar, Kembalinya partai mendapatkan haknya untuk berkuasa dan berperan penuh. Namun demikian, pada fase ini ada sedikit permasalahan antara Pers dan kekuasaan. Walaupun tidak sampai ada pemberangusan Pers, Presiden KH. Abdurrahman Wahid sedikit banyak merasa dipojokkan oleh kritik-kritik keras Pers melalui apa yang biasa dikatakan sebagai “pemelintiran” berita dan informasi.

Demokrasi, sebagaimana juga halnya dengan Negara. menurut KH. Abdurrahman Wahid, tidaklah pernah sempurna dan memuaskan. Kerelaan untuk menerima kenyataan ini justru membangkitkan tekad selalu mengusahakan perbaikan terus menerus, agar menghampiri kesempurnaan, sekaligus menjaga agar tidak terjadi kemerosotan dan kemacetan, apalagi penyimpangan dan ketimpangan yang tidak perlu.

Bagi KH. Abdurrahman Wahid, demokrasi adalah sebuah proses. Ia selalu berada dalam bentuk kesementaraan, dalam keadaan menjadi. Tetapi hal ini tidak boleh dijadikan alasan, sebagaimana yang sering dilakukan oleh kaum apolgis, untuk menunda-nunda dilaksanakannya sistem demokratis, apalagi dengan mengeluarkan dalih yang merendahkan, seperti “belum siapnya rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat” dan “kurang terdidiknya rakyat” untuk bisa menghargai kebebasan demi pelaksanaan hak warga negaranya, yang semua itu dijadikan alasan untuk menunda sebuah perubahan.

Di atas telah disinggung pandangan KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi sebagai suatu proses. Salah satu maksudnya ialah untuk menyatakan bahwa demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang pernah selesai dan sempurna atau bisa dikatakan dalam bentuk kesementaraan, dalam keadaan menjadi. Kesukaran dari akibat pernyataan ini ialah bahwa akan timbul reaksi yang akan menggunakan sifat “sementara” dan “tidak sempurna” dari proses demokrasi itu, sebagai alasan pembelaan (apologia bagi sistem yang ada: bukankah itu mengharuskan kita menerima keadaan yang ada

dengan sabar, karena memang kondisi demokrasi sekarang belum mencapai tingkat yang memuaskan semua pihak).¹⁷

Sehingga demokrasi sebagai proses juga mengandung makna bahwa kadar pelaksanaan konkret dari prinsip demokrasi itulah yang dijadikan ukuran terpenting. Dengan sistem ketatanegaraan yang sama, artinya dengan susunan kekuasaan yang secara formal sama, bisa didapat keadaan demokrasi yang berlain-lainan. Pada suatu waktu tertentu misalnya, sebuah lembaga legislatif lebih berimbang pengaruhnya dengan eksekutif. Keadaan atau kondisi demokrasi kita bisa berubah-ubah, berkembang baik atau merosot ke bawah, tergantung dari imbalanced kekuatan yang berlaku.

Demokrasi yang kita inginkan itu beroperasi dalam kenyataan kemajemukan masyarakat, yaitu adanya berbagai golongan dan kelompok, besar dan kecil, yang berbeda-beda bahkan bertentangan, yang berdasarkan baik suku, agama, keyakinan, kelompok kepentingan, maupun pengelompokan dengan dasar lainnya, yang sama-sama berhak untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik. Demokrasi dan mekanismenya tidak akan bisa dan memang tidak perlu, melenyapkan perbedaan yang ada. Semboyan kekeluargaan pun yang seolah-olah mempersatukan semua. Justru demokrasi itu adalah pengakuan adanya perbedaan. Selamanya, di dalam masyarakat yang isinya berbeda-beda itu, suara mayoritas yang akan menentukan keputusan bersama.¹⁸

Sebagai sebuah perjuangan, maka demokrasi bermakna dalam proses bukan dalam produk semata. Ini terlihat bahwa ketika Abdurrahman wahid memberikan kritik secara tajam tentang sulitnya menegakkan demokrasi. Meskipun sulit, dia tetap berkeyakinan bahwa demokrasi tetap harus diperjuangkan.

“Di negeri kita, demokrasi belum tegak dengan kukuh dan masih lebih berupa hiasan luar yang bersifat kosmetik belaka daripada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya. Dalam suasana

¹⁷ Sukron Kamil MA, “*Islam & Demokrasi: Telaah Konseptual & Historis*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012), 195.

¹⁸ Abdurrahman Wahid, “*Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*”, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 154.

demikian ini, unsur-unsur masyarakat yang ingin melestarikan kepincangan sosial yang ada dewasa ini tentu akan berusaha sekuat tenaga membendung aspirasi demokrasi yang hidup dikalangan mereka yang telah sadar akan perlunya kebebasan ditegakkan di negeri ini. Kalau tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan demokrasi yang benar di negeri ini, tentu aspirasi-aspirasi itu akan terbendung oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi itu. karenanya, dari sekarang sebenarnya telah di tuntut dari kita kesediaan bersama untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah dimulai dengan kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah”.¹⁹

Dalam terminologi ini, semakin jelas bahwa Perspektif KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi bukanlah diletakkan dalam kerangka perjuangan untuk kepentingan umat Islam semata, melainkan sebagai cita-cita yang bersifat universal.

Jika penegakan demokrasi hanya difokuskan pada kepentingan kelompok atau agama tertentu, justru mengakibatkan terjadinya polarisasi dalam masyarakat. Polarisasi tersebut bisa mengakibatkan keterpurukan Negara ini ke dalam konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Demokrasi tidak pernah berhubungan dengan kepentingan suatu golongan atau kelompok tertentu, melainkan berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. KH. Abdurrahman Wahid menganggap bahwa dalam perjalanan sepuluh tahun terakhir telah tercapai bentuk yang sangat baik baik terhadap upaya tersebut di atas, yaitu proses demokratisasi.

Harapan bagi tegaknya demokratisasi seperti ini menunjukkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid tidak berupaya meminggirkan nilai agama dalam pendapat tersebut, melainkan hanya memberikan suatu kontribusi tentang betapa pentingnya menegakkan demokrasi tanpa harus melibatkan diri pada formalisasi agama. Tanpa formalisasi agama pun,

¹⁹Santoso, Listiyono, “Teologi politik Gus Dur,” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2010), 208.

demokratisasi sesungguhnya merupakan bagian integral dari nilai-nilai agama.

Salah satu sebab yang menghambat kiprah demokratisasi bagi KH. Abdurrahman Wahid di kalangan lembaga keagamaan adalah perbedaan hakikat nilai-nilai dasar yang dianut keduanya. Sebuah agama senantiasa bertitik tolak dari pandangan normatif yang diajarkan oleh kitab sucinya. Pola pikir ini pada akhirnya menganggap bahwa hanya ada satu jenis kebenaran yang dapat diterima sebuah agama, yaitu kebenaran agamanya sendiri. Sedangkan dalam demokrasi, justru membuka peluang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat. Peluang tersebut dirasakan dapat “mengancam” keabadian nilai-nilai keagamaan.

Dalam hal ini pandangan KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, setidaknya ditujukan pada tiga hal, yaitu:²⁰

- a. Pengembangan wawasan kebangsaan dengan entry point menolak segala bentuk *eksklusivisme* dan *sektarianisme*.
- b. Kegigihan dalam mengupayakan *civil society* yang berdaya.
- c. Penghargaan terhadap *pluralisme* atau kemajemukan masyarakat Indonesia.

Satu hal yang menarik dalam pemikiran KH. Abdurrahman Wahid adalah bahwa meskipun demokrasi dianggap sebagai pilihan yang rasional di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, tetapi ia berkeyakinan bahwa demokrasi bukanlah proses yang selalu berakhir dengan memuaskan dan sempurna. Itulah sebabnya ia menyarankan agar demokrasi harus diperjuangkan secara terus menerus. Demokrasi bagi KH. Abdurrahman Wahid tidaklah mengobati apa-apa, demokrasi hanya ingin meluruskan pemerintahan yang tadinya otoriter menjadi lebih peduli pada rakyat.

Demokrasi pada akhirnya menjadi pilihan logis bagi realitas sosial empirik negara Indonesia, yaitu dengan menolak tunduk kepada kekuatan diktator mayoritas sekaligus juga pada tirani minoritas. Dengan kata lain, demokrasi mengharuskan semua pihak untuk tetap diperlakukan sama di depan Undang-undang, tidak melebihkan yang mayoritas, sekaligus juga tidak menganak emaskan yang minoritas. Demokrasi yang demikian menjadi impian dan perjuangan KH. Abdurrahman Wahid

²⁰Abdurrahman Wahid, "*Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*", (The Wahid Institute, 2006), 102.

sejak awal kemunculannya selalu terlibat bagi upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi Islam

1. *Pluralisme*

Pluralisme adalah sebuah paham yang mengakui dan mempercayai adanya perbedaan dalam masyarakat yang meliputi perbedaan agama, ras, kelompok, suku budaya, dan adat istiadat. Dalam membicarakan pluralisme, KH. Abdurrahman Wahid tak jarang menghubungkannya dengan agama, karena agama inilah yang sering dimanfaatkan oleh mayoritas dalam menindas dan menekam secara diam-diam kaum minoritas. Pandangan KH. Abdurrahman Wahid terhadap pluralisme tercermin pada sikapnya yang membela minoritas dan non muslim dan melakukan kerjasama dengan siapa saja secara terbuka, baik dengan kelompok kristen, hindu, budha, maupun kelompok Islam yang lain. Contoh ketika pemimpin tabloid Monitor Arswendo Atmowiloto menempatkan nabi Muhammad Saw. pada urutan ke 11 di antara tokoh dunia. Umat Islam secara spontan bereaksi dan meminta agar kantor tabloid di tutup dan dilarang beroperasi lalu KH. Abdurrahman Wahid mengatakan: "Saya tidak setuju dengan itu. Bawalah ke pengadilan itulah penyelesaian yang terbaik". KH. Abdurrahman Wahid memberikan pelajaran kepada rakyat untuk menghargai otoritas Pengadilan dan tidak bertindak menghakimi sendiri.

KH. Abdurrahman Wahid menurut Frans Magnis Suseno adalah seorang yang menghayati agama Islam secara sangat terbuka. Ia sosok pribadi yang bebas dari segala kecikikan, primordialistik dan sektarian. Ia jelas seratus persen seorang yang beragama Islam tetapi keislamannya begitu mantap sehingga ia merasa tidak terancam oleh pluralitas.²¹

Kelompok minoritas lain yang sering dibela KH. Abdurrahman Wahid adalah penganut Konghucu, kendati negara tidak mengakui keberadaan negara ini khususnya pada masa ode baru tapi KH. Abdurrahman Wahid tetap

²¹Syamsul Mu'arif dan Ahmad Barizi, "*Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralis dan Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Khilaf dalam Islam*", (Malang: UMM Press, 2014), 145.

membelahnya sebagai hak pribadi terhadap suatu keyakinan tentang kebenaran ajaran yang dianut. Pembelaan dan pengakuannya terhadap hak minoritas ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial kebangsaan dan praktek demokrasi. Hal ini pulalah yang mendasari diakuinya kemudian Konghucu sebagai agama dalam pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid.

Sikap pluralis KH. Abdurrahman Wahid yang tampak lebih mementingkan kelompok minoritas tak jarang mendapat tuduhan dan hujatan yang bertubi-tubi, bahkan ia dituduh sekuler dan penghianat umat, padahal sikap KH. Abdurrahman Wahid yang demikian justru ingin mengfungsionalisasikan ajaran Islam secara maksimal. Agama tidak sekedar simbol, dan menawarkan janji ke akhirat-an sementara realitas kehidupan yang ada dibiarkan tidak tersentu. Sikap KH. Abdurrahman Wahid tidak pernah memperlihatkan kebenciannya pada kaum minoritas menyebabkan pula bisa bergaul siapa saja.

Seperti dalam kaitanya dalam demokrasi islam yang menjelaskan bahwa *Al-Musawah* berarti persamaan atau kesetaraan seluruh manusia di dalam hak dan kewajibannya. Artinya, semua manusia sama karena semuanya adalah hamba Allah, Tanpa ada pemisahan atau tidak dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, pangkat, jabatan, harta, suku bangsa, bahasa atau lainnya. Dalam konsep modern, yang dimaksud prinsip persamaan adalah kesamaan dalam kesempatan (*equality of opportunity*), yakni kesamaan dengan cara menghapus hambatan yang bisa menghalangi individu dalam mewujudkan potensinya, dengan menghapus hukum dan hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi-posisi sosial, ekonomi dan politik bagi kelas dan tertentu. Dimana pada konsep sensus (*'ijma*), atau persetujuan beserta dari sekelompok orang bahwa info eksklusif keliru atau benar. Kaum Moderat jua telah mencoba menafsirkan pulang konsep consensus buat menopang ide demokrasi yg dipengaruhi oleh kehendak secara umum dikuasai. Ini selaras dengan demokrasi islam yang berupa syura dimana adanya persamaan, persetujuan seluruh umat.²²

²²Rindi Fortuna, "Konsep Syura dalam Politik Islam (Studi Perbandingan Antara Syura dan Demokrasi)," *Universitas Negeri Sumatera*, 2015, 20.

Gagasan KH. Abdurrahman Wahid mengenai toleransi dan dialog antar agama atau antar iman tersingkronisasi dalam pemikirannya mengenai pluralisme. Apabila seseorang berpikir positif tentang pluralisme, maka otomatis di dalamnya sudah ada unsur-unsur yang menunjukkan sikap toleran dalam keberbedaan. Th. Sumartana, seorang penganut Katolik menilai bahwa KH. Abdurrahman Wahid melihat perbedaan agama-agama cenderung merupakan perbedaan yang berada dalam tataran kemanusiaan dan tetap yakin bahwa sesungguhnya yang menjadi hakim untuk mengatakan seorang masuk surga atau neraka adalah Tuhan. Bahkan ia mengatakan informasi dan ekspresi diri yang dianggap merugikan Islam sebenarnya tidak perlu dilayani. Cukup di imbangi dengan informasi dan ekspresi diri yang positif konstruktif.²³

2. *Liberalisme*

Liberal merupakan bersifat bebas atau berpandangan bebas (luas dan terbuka). Menurut KH. Abdurrahman Wahid liberalisme dapat menjawab tantangan modern. Menurutnya hukum Islam harus dinamis sesuai dengan relevansi perkembangan sosial dan tidak menutup diri (konservatif atau tradisional). Pemikir islam yang berkembang ketika itu cenderung mengedepankan hukum yang sudah ada tanpa adanya perhatian terhadap relevansinya. Kemudian dalam bermadzhab Syafi'i, KH. Abdurrahman Wahid juga menekankan selayaknya tidak hanya mengikuti pendapatnya saja namun juga harus memperhatikan metode (*manhaj*) dalam proses hukum tersebut. Hal itu diyakini oleh KH. Abdurrahman Wahid karena Islam bersifat universal.²⁴

KH. Abdurrahman Wahid juga dianggap liberal ketika gagasannya mengenai penggantian salam dalam sapaan, pembelaan dan sikapnya terhadap pemeluk agama non-Islam karena menurutnya manusia tidak bisa menghakimi sebuah agama karena yang menciptakan agama adalah tuhan, dan ketika KH. Abdurrahman Wahid menyebutkan bahwa NU pada

²³Indo Santalia, "K. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi," *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial dan Agama*, Vol.1, No. 02 (2015), 138. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adyan/article/view/1340>.

²⁴Ali Mutakin, "*Islam Dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyash Tentang Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam*", *Jurnal Al-Ashriyah*, vol. 1, No. 1, (2019), 50.

dasarnya adalah Syi'ah Kultur. Semua gagasan tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip Islam khususnya prinsip Aswaja (Ahlu Sunnah Wal Jama'ah). Pandangan KH. Abdurrahman Wahid mengenai kaidah beragama dan toleransi beragama bagi sebagian pihak dinilai sangat liberal dan sekular.

Liberalisme dekat dengan KH. Abdurrahman Wahid karena memang penegetahuannya yang luas akan pemikiran barat. Saat usia remaja, KH. Abdurrahman Wahid sudah membaca buku-buku berisi pemikiran barat seperti "*What is to be done*" karya Lenin, "*Captain's Daughter*" karya Turgenev atau "*Das Capital*" karya Karl Marx. Meskipun KH. Abdurrahman Wahid berasal dari keluarga yang mengedepankan agama dan budaya pesantren namun KH. Abdurrahman Wahid tidak menutup mata terhadap kemajuan dan peradaban barat. Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid bagi sebagian orang bahkan dianggap melampaui batas. Pemikirannya akan tajdid, sekularisasi agama, reaktualisasi hukum Islam, dan sikap pluraslime agama pada dasarnya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam sendiri karena KH. Abdurrahman Wahid memiliki dasar fiqh yang kuat.²⁵

Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid dianggap liberal karena pemikirannya dianggap menyimpang dari ajaran agama oleh sebagian masyarakat khususnya tradisional. Makna liberal kemudian mengarah kepada pemikiran yang negatif bagi asumsi sebagian masyarakat. namun dalam konteks ini liberal lebih diartikan sebagai pemikiran yang tidak konservatif atau fundamentalis. Terlepas dari apakah pemikiran tersebut negatif atau positif, liberal membantu menjelaskan sikap yang diambil oleh KH. Abdurrahman Wahid dalam setiap langkah politiknya khususnya ketika diakitkan dengan urusan agama. Seperti telah dijelaskan sebelumnya maka pada dasarnya pemikiran KH. Abdurrahman Wahid kembali kepada tujuan politik yang bersifat mengutamakan kemaslahatan dalam pluralistik. Dengan dasar ilmu pengetahuan tersebut kemudian KH. Abdurrahman Wahid mencoba menerapkannya dalam sebuah tindakan nyata.

KH. Abdurrahman Wahid merupakan sosok pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan agama dan

²⁵ Nader Hashemi, "*Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies*", Jurnal Oxford University Press, Vol. 22, No. 1, (2013), 32.

politik. KH. Abdurrahman Wahid menegaskan kedudukan antara agama dan politik sebagai berikut: “Hukum agama tidak akan kehilangan kebesarannya dengan berfungsi sebagai etika masyarakat. Bahkan kebesarannya akan memancar, karena itu mampu mengembangkan diri tanpa dukungan massif dari institusi negara. Beragama Islam yang artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah, adalah tujuan hidup yang luhur. Karenanya haruslah dihindarkan agar Islam tidak diletakkan dibawah wewenang negara, melainkan menjadi kesadaran kuat dari warga masyarakat. Bukankah lalu menjadi sangat dalamkannya sabda Nabi Muhammad, ‘bahwasanya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan Ahklak. Kemuliaan Ahklak hanyalah terasa logis untuk disempurnakan, jika upaya itu diartikan sebagai pengembangan kesadaran mendalam akan etika sosial dari suatu masyarakat bangsa”.²⁶

Dalam konteks tersebut, KH. Abdurrahman Wahid ingin menjelaskan bahwa Islam sebagai agama memiliki kedudukan di atas negara. Hal tersebut bersifat mutlak untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup manusia. Islam kemudian berfungsi sebagai etika sosial yang diharapkan dapat diterima oleh lapisan masyarakat yang dalam hal ini berupa Akhlak (perilaku) yang baik. Dalam hal beragama, KH. Abdurrahman Wahid lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat substantif dengan menangkap esensi Islam yang mendahulukan kemaslahatan atau kebutuhan aktual masyarakat. Sebagai contoh apabila dikaitkan dengan Al Qur’an, maka tidak hanya sebatas menjaga teks-teksnya atau mengartikannya namun juga berupaya menangkap makna dan pesan disertai dengan relevansi kebutuhan umat.

²⁶Abdurrahman Wahid, “*Penafsiran Ulang terhadap Ajaran Agama, dalam Prisma Pemikiran K Abdurrahman Wahid*”, (yogyakarta: Lkis 2000), 124.